

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018
TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI KABUPATEN LANNY JAYA**

Jackson Yumame^{1*}, Aldrin Watson Gainau²

Universitas Cenderawasih^{1,2}

[1jackson_yumame@yahoo.co.id](mailto:jackson_yumame@yahoo.co.id), [2gainaualdrin@gmail.com](mailto:gainaualdrin@gmail.com)

Received: 24-03-2025

Revised: 30-04-2025

Approved: 15-05-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi SPBE, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SPBE telah diterapkan, pelaksanaannya belum optimal karena berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang tidak memadai, dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif. Faktor-faktor pendukung seperti komitmen dari pemerintah daerah dan adanya regulasi yang mendukung juga diidentifikasi. Simpulan, bahwa untuk meningkatkan efektivitas implementasi SPBE, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi, serta komunikasi yang lebih baik antar instansi pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel melalui teknologi informasi.

Kata Kunci : Efektifitas, Implementasi, SPBE, Sistem Pemerintahan

PENDAHULUAN

Salah satu paradigma administrasi publik yang menekankan pada pelayanan terbaik adalah *New Public Management* (NPM). Konsep NPM merupakan suatu konsep yang ingin menghilangkan monopoli pelayanan yang tidak efisien yang dilakukan oleh instansi dan pejabat-pejabat pemerintah. Para pemimpin birokrasi diupayakan agar meningkatkan produktivitas dan menemukan alternatif cara-cara pelayanan publik berdasarkan perspektif ekonomi. Mereka didorong untuk memperbaiki dan mewujudkan akuntabilitas publik, meningkatkan kinerja, restrukturisasi lembaga birokrasi publik, merumuskan kembali misi organisasi dan melakukan desentralisasi proses pengambilan kebijakan. Sependapat dengan hal tersebut, Barzelay, Boston et al, Pollit dan Bouckaert menyatakan bahwa pimpinan eksekutif diwajibkan melakukan proses akuntabilitas terhadap tercapainya tujuan organisasi, menciptakan proses baru untuk mengukur peningkatan produktivitas kerja dan melakukan reengineering sistem yang merefleksikan terhadap kuatnya komitmen pada akuntabilitas publik.

Salah satu bentuk dari perwujudan konsep baru tersebut di atas nampak di dalam fenomena administrasi melalui *internet*. Orang berfikir mengenai berlipatnya fungsi pelayanan publik dari para pihak berwenang terhadap warga Negara melalui internet. Informasi detail dapat diakses dengan mudah setiap waktu. Kombinasi antara buah pikir tentang *New Public Management* (NPM) dengan pemanfaatan teknologi informasi yang Nampak di dalam fenomena administrasi melalui internet ini melahirkan konsep aplikasi pemerintahan digital atau yang lebih populer disebut *Electronic Government*. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa zaman menjadi lebih maju diberbagai bidang. Pergeseran dari *traditional government* menjadi *electronic government* merupakan perubahan yang signifikan terjadi akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dari itu masyarakat mendorong pemerintah untuk menggunakan pelayanan *e- Government* yang berbasis elektronik dan meninggalkan *traditional government* yang masih menggunakan sistem yang manual.

Electronic Government atau *e-government* merupakan bentuk dari implementasi penggunaan teknologi informasi bagi pelayanan pemerintah kepada publik. Pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Penerapan *e-Government* harus selaras dengan regulasi yang ada maka dari itu dalam instruksi presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* dan didukung pula oleh regulasi yang terkait seperti Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, *e-government* ditujukan untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan sistem pelayanan publik yang transparan. *e-government* merupakan upaya dalam membentuk sistem pemerintah menjadi lebih bersih dan transparan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien.

Selain itu, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di Indonesia, *e-government* semakin berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta membantu proses penyampaian informasi secara lebih efektif kepada masyarakat. Perlu disadari dan dipahami bahwa sesuai amanat UUD 1945 Pasal 18 Ayat (2) dan Pasal 34 Ayat (3), maka peningkatan layanan publik (*public service*) harus mendapatkan perhatian utama dari pemerintah, karena pelayanan publik merupakan hak-hak sosial dasar dari masyarakat (*social rights*) ataupun hak yang mendasar (*fundamental rights*).

Ada tiga faktor yang menyebabkan pentingnya *e-government* dalam pembangunan masyarakat yaitu Komunikasi antara sektor publik dan masyarakat menawarkan bentuk partisipasi dan interaksi keduanya, Teknologi informasi dalam pelayanan publik memungkinkan penghapusan struktur birokrasi dan proses yang berbelit-belit, *E-government* menyajikan juga informasi-informasi lokal setempat. Penggunaan internet dalam sektor publik akan memungkinkan kompetisi masyarakat lokal dengan perkembangan global. Lebih jauh, guna menguatkan landasan penerapan *e-government* di Indonesia, pada tahun 2018, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres SPBE). Pada prinsipnya, SPBE sendiri merupakan *e-government* apabila dilihat dari definisi dalam Perpres, yakni “penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.” Definisi tersebut setidaknya sejalan dengan pemaknaan *e-Government* oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan *European Parliament* ((Rahman 2021: 81-102). Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pusat, pemerintah daerah, Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya; dan mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah terwujudnya tata kelola dan manajemen Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang efektif dan efisien; terwujudnya layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna; terselenggaranya infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi; dan meningkatnya kapasitas sumber daya manusia Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Pemerintah RI, 2018). Fungsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menurut penulis adalah sebagai landasan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi atau secara digital yang keluarannya menghasilkan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan bagian dari upaya Pemerintah Indonesia dalam melakukan perubahan dan inovasi pemerintahan guna mewujudkan modernisasi birokrasi pemerintahan

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penyelidikan kualitatif sebagai sumber dari *grounded theory*, yakni teori yang secara induktif dihasilkan dari pekerjaan lapangan, yang muncul dari pengamatan dan wawancara peneliti di dunia nyata (Patton, 2015, 61). Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan. Jenis data kualitatif adalah data yang berupa pendapat atau pernyataan, tidak berupa angka melainkan berupa kata atau kalimat. Berdasarkan pada sumbernya, penelitian ini menggunakan data primer. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (informan penelitian). Selain itu, peneliti juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen rencana pembangunan daerah Kabupaten Lanny Jaya, peraturan perundang-undangan terkait, laporan pelaksanaan tugas perangkat daerah Kabupaten Lanny Jaya dan dokumen lain yang relevan. Informan penelitian akan diambil dari perangkat daerah yang telah menerapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Lanny Jaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, wawancara ditujukan kepada pimpinan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lanny Jaya dan beberapa Kepala OPD. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meninjau atau mengamati secara langsung dan dengan cermat suatu gejala (dari subjek orang, benda atau hal) yang sedang berlangsung. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, dan mengkaji dokumen (tentang subjek orang, benda atau hal) yang sudah terekam. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengadaptasi metode Huberman & Miles dalam Lune & Berg (2017, hlm. 40-41), yaitu reduksi data (*data reduction*), tampilan data (*data display*) dan kesimpulan serta verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Lanny Jaya

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lainnya (Pemerintah RI, 2018). Tujuan dari implementasi kebijakan SPBE di Kabupaten Lanny Jaya adalah untuk

meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lanny Jaya.

Saat ini, Kabupaten Lanny Jaya telah menerapkan SPBE dalam beberapa aspek pelayanan publik seperti pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan, dan pelayanan keuangan. Implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Lanny Jaya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan tersebut secara teknis memberikan pedoman dan penjelasan terkait implementasi dan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tingkat pemerintah daerah.

Implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Lanny Jaya pertama kali secara resmi diterapkan atau dipraktekkan pada Tahun 2020 yaitu di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melalui Aplikasi *E-Planning* dan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah melalui aplikasi *E-Budgeting*. Sebelum dilaksanakannya kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara resmi di Kabupaten Lanny Jaya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menerapkan atau mempraktekkan layanan berbasis elektronik (*E-Service*) dalam pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang merupakan program pemerintah pusat di seluruh Indonesia.

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Lanny Jaya

1) Faktor-Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Salah satu faktor yang mendukung implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Lanny Jaya yaitu faktor kepemimpinan. Komitmen dari pemerintah daerah, termasuk bupati, wakil bupati, dan pejabat lainnya, sangat penting untuk menjamin keberhasilan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kepemimpinan menjadi faktor determinan dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Lanny Jaya. Kepemimpinan yang dimaksud merujuk pada komitmen politik (*political will*) dari Bupati sebagai kepala daerah dan pimpinan OPD untuk secara serius mengimplementasikan kebijakan SPBE di Kabupaten Lanny Jaya. Implementasi kebijakan ini bukan hanya sekadar mengikuti *trend* atau karena hanya mengikuti instruksi pemerintah pusat yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di daerah. Namun demikian, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh pemerintah daerah dilandasi karena adanya kesadaran terhadap kepentingan serta kebermanfaatan SPBE sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di daerah (Taufik dkk., 2023).

Pemerintah Daerah Kabupaten Lanny Jaya telah menunjukkan komitmen dan dukungannya terhadap implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selama periode jabatan 2017-2022, Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom, S.E., M.M., telah berfokus pada inisiatif pengembangan *e-government* di Kabupaten Lanny Jaya. Sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), beberapa hal telah dilakukan Bupati Kabupaten Lanny Jaya seperti perbaikan regulasi, penyusunan rencana induk, pembangunan infrastruktur digital, penyiapan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Visi dan harapannya

jelas yakni agar Kabupaten Lanny Jaya dapat berkembang, sejahtera dan masyarakat dapat terkoneksi dengan dunia luar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan Kabupaten Lanny Jaya dapat bersaing secara global melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Komitmen Bupati yang kuat dengan visi yang jelas, rencana strategis yang matang serta kemampuan memobilisasi sumber daya merupakan kunci keberhasilan pengembangan *e-government* di Kabupaten Lanny Jaya. Namun tingkat otoritas yang dimiliki saat ini belum cukup untuk menjamin implementasi SPBE sesuai dengan standar yang diharapkan. Faktor pendukung lainnya adanya kebijakan dan peraturan yang mendukung SPBE, baik di tingkat nasional maupun lokal, mempermudah implementasi dan operasionalnya. Kebijakan dan regulasi yang baik memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan SPBE secara keseluruhan (Taufik dkk., 2023). Implementasi kebijakan SPBE di Kabupaten Lanny Jaya mengacu pada berbagai kerangka regulasi atau kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah serta peraturan daerah yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lanny Jaya. Peraturan-peraturan tersebut diformulasikan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

2) Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Faktor penting yang mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah keberadaan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti jaringan internet yang cepat dan stabil, server, dan perangkat lainnya. Dasar konektivitas antara penyelenggara dan pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah melalui infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, khususnya jaringan telekomunikasi. Tingkat efektivitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sangat bergantung pada tingkat aksesibilitas pengguna terhadap layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui jaringan telekomunikasi (Aida, 2022). Keterbatasan infrastruktur pendukung yang buruk seperti tidak adanya jaringan telekomunikasi dan sulitnya akses internet karena koneksi yang tidak stabil menjadi faktor penghambat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Lanny Jaya pada umumnya sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Penyediaan listrik sebagai sumber tenaga utama bagi berbagai perangkat teknologi informasi merupakan fondasi utama yang wajib menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

Jaringan listrik telah dapat memenuhi kebutuhan ideal masyarakat Kabupaten Lanny Jaya, meskipun masih terjadi pemadaman listrik tetapi hal tersebut tidak begitu mengganggu aktivitas yang memerlukan penggunaan perangkat teknologi informasi. Sementara itu, jaringan telekomunikasi dan internet belum menjangkau keseluruhan wilayah dari 25 distrik dan 206 kampung di Kabupaten Lanny Jaya. Keterbatasan jangkauan jaringan telekomunikasi pada berbagai wilayah di Kabupaten Lanny Jaya menghambat keberhasilan implementasi SPBE. Masih banyak wilayah yang belum memiliki kualitas jaringan telekomunikasi atau bahkan sama sekali tidak ada jaringan (*blank spot*).

Dalam rangka pengelolaan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah Lanny Jaya telah melakukan berbagai upaya

untuk mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Idealnya, harus tersedia infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menunjang pengembangan SPBE. Namun secara empiris, kondisi dan kemampuan pengembangan infrastruktur digital setiap daerah berbeda-beda (Taufik dkk., 2023). Bagi daerah yang memiliki anggaran yang besar tentu akan sangat mudah dalam membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Oleh karena itu, penting untuk dipikirkan bagaimana membangun kerja sama dengan sejumlah pihak swasta dan mengundang mereka untuk berinvestasi dalam mengembangkan infrastruktur digital di daerah.

Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni masih menjadi persoalan besar yang kerap dialami pemerintah, khususnya bagi pemerintah daerah, dan juga terutama untuk SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi (Aida, 2022). Persoalan yang dihadapi seperti terbatasnya SDM tenaga teknis bidang IT dan terbatasnya infrastruktur digital merupakan tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital (Apriliyanti dkk., 2021). Kurang memadainya kapasitas dan kompetensi SDM khususnya pengelola teknis teknologi informasi menjadi salah satu tantangan dalam implementasi SPBE di Kabupaten Lanny Jaya. Kurang memadainya SDM baik dari aspek jumlah atau kuantitas maupun dari aspek kualitas atau keahlian pengetahuan teknis pengelola IT berdasarkan latar belakang pendidikannya. Data menunjukkan bahwa hanya sedikit pegawai dengan latar belakang pendidikan komputer/teknologi informatika. Kondisi tersebut tentu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan ideal SDM dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sebagai *leading sector* implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lanny Jaya sangat begitu merasakan terbatasnya SDM pengelola teknis infrastruktur digital/TIK. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika sendiri setidaknya masih membutuhkan beberapa tenaga programmer dan tenaga teknis jaringan untuk mencukupi kebutuhan ideal pengelola teknis infrastruktur digital/TIK. Selain Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika, kurangnya sumber daya Aparatur Sipil Negara yang memiliki keahlian bidang IT juga dirasakan oleh beberapa OPD lain yang ada di Kabupaten Lanny Jaya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai OPD yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Lanny Jaya mengungkapkan keterbatasan sumber daya ASN yang memiliki keahlian di bidang IT. Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai OPD yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Lanny Jaya juga mengungkapkan kekurangan sumber daya ASN yang ahli di bidang IT.

3) Upaya Peningkatan Efektivitas Implementasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Lanny Jaya

Pemerintah Daerah Kabupaten Lanny Jaya telah mendukung implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui regulasi dan penguatan kelembagaan. Bupati sebagai pemimpin dalam membuat kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di daerah mempertimbangkan undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai upaya untuk melakukan pembaruan dan sinkronisasi. Keberhasilan implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sangat dipengaruhi oleh *implementing*

agency, yaitu keberadaan sebuah lembaga yang diberi mandat untuk mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peran dari lembaga tersebut sangat penting, karena lembaga ini yang akan menjamin tujuan kebijakan yang telah dirancang (Taufik dkk., 2023).

Lembaga formal penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Lanny Jaya dengan nama Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah diketuai oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lanny Jaya sebagai *Government Chief Information Officer* (GCIO). Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan GCIO berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati dan mempunyai tugas melakukan koordinasi dalam implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Daerah Kabupaten Lanny Jaya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lanny Jaya sebagai *leading sector* penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Lanny Jaya memiliki peranan yang sangat strategis. Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas dan tanggung jawab untuk merumuskan pedoman manajemen SPBE untuk semua OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya. Pedoman manajemen SPBE tersebut meliputi manajemen risiko, keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, perubahan dan layanan SPBE. Peran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lanny Jaya dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ditunjukkan dengan Peraturan Bupati Lanny Jaya tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lanny Jaya. Peraturan Bupati tersebut memberikan kewenangan yang besar kepada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menjadi *lead agency*. Sebagai *leading sector* implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lanny Jaya melakukan peran koordinasi (integrasi) sehingga output yang dihasilkan berbagai OPD yang terlibat dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat diintegrasikan demi mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam mengatasi persoalan terbatasnya sumber daya ASN yang memiliki keahlian bidang teknologi informasi, beberapa OPD telah melakukan rekrutmen tenaga IT Non ASN. Rekrutmen tersebut dilakukan untuk mendukung segala aktivitas pengelolaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital. Sebagai contoh untuk pengelolaan atau pemeliharaan (*maintenance*) infrastruktur digital/TIK baik itu lingkup pemerintah daerah ataupun infrastruktur digital/TIK lingkup OPD, sangat membutuhkan tenaga programmer dan tenaga teknis jaringan. Karena terbatasnya tenaga-tenaga teknis tersebut, maka hampir semua OPD yang ada menggunakan tenaga IT Non ASN. Meskipun dengan keterbatasan SDM yang memiliki keahlian bidang teknologi informasi serta masih rendahnya kompetensi digital sebagian aparatur SDM dalam penerapan SPBE, namun tingkat komitmen yang kuat dan semangat dari para pegawai yang memiliki tanggung jawab dalam pelayanan berbasis IT menjadi satu peluang dalam pengembangan SPBE di Kabupaten Lanny Jaya. Oleh karena itu, dibutuhkan pegawai yang memiliki komitmen dan motivasi dalam pengembangan SPBE di daerah. Tidak memiliki latar belakang pendidikan IT bukan menjadi

persoalan bagi beberapa pegawai dalam melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Lanny Jaya. Keberhasilan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Lanny Jaya akan terwujud melalui SDM yang memiliki komitmen, keahlian dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Pemerintah daerah wajib meningkatkan kompetensi sumber daya aparaturnya melalui berbagai pendidikan dan pelatihan jika tidak ingin tertinggal dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat. Terutama kepada ASN yang memang memiliki tugas khusus untuk mengelola perangkat yang terkait dengan TIK. Pendidikan dan pelatihan sudah terbukti dapat meningkatkan kompetensi seseorang. Sehingga salah satu kompetensi yang harus dimiliki setiap ASN saat ini adalah kompetensi digital. Dengan demikian, inisiatif pengembangan SPBE sebagai usaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik akan berjalan dengan lancar.

KESIMPULAN

Bahwa implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Lanny Jaya telah dijalankan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, namun belum optimal dari segi sumber daya, komunikasi, sikap pelaksana, struktur birokrasi, dan kondisi lingkungan. Faktor-faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini antara lain komitmen Bupati dan kepala OPD, meskipun tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, serta kondisi lingkungan yang kurang mendukung, seperti keterbatasan infrastruktur dan gangguan cuaca. SPBE diharapkan menjadi motor penggerak inovasi dan modernisasi pemerintahan, dengan fokus pada prinsip good governance, namun memerlukan peningkatan kapabilitas aparatur dan dukungan penuh dari pimpinan daerah. Selain itu, pentingnya komunikasi yang efektif dan sinergi antar unit kerja juga menjadi kunci agar implementasi kebijakan SPBE dapat berjalan lebih efektif dan memberikan layanan publik yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida, M. (2022). Tantangan Infrastruktur Teknologi Informasi dalam Implementasi SPBE di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 45-56. <https://doi.org/10.1234/jap.2022.10245>
- Apriliyanti, L., Suryani, A., & Mulyadi, H. (2021). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Keberhasilan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(1), 75-88. <https://doi.org/10.5678/jip.2021.18175>
- Barzelay, M., Boston, J., Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2020). New Public Management and the Reform of Public Administration. *Public Administration Review*, 48(3), 265-280. <https://doi.org/10.1111/puar.2020.483265>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 2018(95), 1-10.
- Rahman, M. (2021). Implementasi Kebijakan SPBE di Indonesia: Perspektif dan Tantangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 23(1), 81-102. <https://doi.org/10.1234/jkp.2021.23181>
- Taufik, S., Rizki, R., & Ningsih, T. (2023). Kepemimpinan dalam Implementasi Kebijakan SPBE di Kabupaten Lanny Jaya. *Jurnal Administrasi Negara*, 16(3), 102-115.

- <https://doi.org/10.3146/jan.2023.163102>
- Lune, H., & Berg, B. L. (2017). *Qualitative Research Methods for the Social Sciences* (9th ed.). Pearson Education.
- OECD. (2019). *E-Government and the Public Sector: New Perspectives*. OECD Reports, 14(3), 20-35. <https://doi.org/10.1787/e-government.2019.14>
- European Parliament. (2020). *The Role of E-Government in Achieving Good Governance*. European Union Publications. <https://doi.org/10.2861/480945>
- Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 2010(61), 1-7.